



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, ada dua penelitian yang menjadi bahan referensi.

Penelitian yang pertama yang dijadikan referensi skripsi berjudul *Representasi Pluralisme Dalam Film Tanda Tanya* (2013). Penelitian ini dibuat oleh Velina Agatha Setiawan, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya.

Metode yang digunakan adalah metode semiotika televisi John Fiske. Dalam penelitian tersebut, Agatha berusaha membedah nilai-nilai pluralisme yang direpresentasikan dalam film *Tanda Tanya*. Agatha menitikberatkan pada analisis potongan adegan dalam film “?” (*Tanda Tanya*) yang merepresentasikan tentang pluralisme dengan menggunakan unit analisis dalam tiga level yaitu, realitas, representasi dan ideologi.

Hasil penelitian yang ditemukan, representasi pluralisme yang digambarkan di dalam film “?” (*Tanda Tanya*) didominasi oleh pluralisme yang menyatakan “*the encounter of commitments*” (perjumpaan dari komitmen). Perjumpaan komitmen dalam film ini ditunjukkan dengan adanya keputusan-keputusan yang diambil tanpa meninggalkan keyakinan agama. Bahkan, karakter-karakter tetap mempertahankan

keyakinan yang dimiliki. Pada kategori tersebut kode-kode yang muncul adalah kode dialog, karakter dan naratif.

Film ini juga menggambarkan bahwa tiap agama mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang tanpa memandang perbedaan agama. Namun, di sisi lain ditemukan bentuk percampuran simbol-simbol agama. Kemunculan unsur percampuran simbol-simbol agama yang terdapat dalam film “?” (Tanda Tanya) berdampak pada kekacauan paham keragaman sebagai pemersatu. Akibatnya, dapat meruntuhkan persepsi masyarakat tentang keragaman di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian milik Agatha dengan peneliti terletak pada subjek penelitiannya. Subjek peneliti adalah film dokumenter berjudul *Shape Of The Moon* dan menggunakan metode semiotika Charles S. Peirce sebagai pisau bedahnya untuk melihat representasi pluralisme agama yang terdapat dalam film *Shape Of The Moon*. Sedangkan, penelitian Agatha menggunakan semiotika televisi John Fiske.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nathanael dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara yang berjudul *Wacana Pluralisme Dalam Pemberitaan Harian Kompas (Studi Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pemberitaan Harian Kompas tentang Peristiwa Wafatnya Gus Dur pada edisi 31 Desember 2009 – 3 Januari 2010)*.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Teun Van Dijk, analisis ini menekankan

bahwa meneliti sebuah wacana tidak cukup hanya berdasarkan analisis teks semata, tetapi juga melihat praktik produksi yang terjadi dalam penyusunan teks berita.

Dari penelitian tersebut, Nathanael menyimpulkan bahwa wacana pluralisme yang ditampilkan melalui pemberitaan-pemberitaan di *Harian Kompas* merupakan praktik dari penerapan ideologi yang dimiliki oleh *Harian Kompas*, yakni humanisme transendental atau kemanusiaan yang beriman.

Oleh karena itu, ketika Gus Dur wafat, *Harian Kompas* mengambil peran untuk mengingatkan kembali masyarakat Indonesia akan peran, perjuangan, dan sumbangsih yang telah Gus Dur lakukan dan berikan semasa hidupnya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi suatu reportase yang komprehensif baik *hard news*, *soft news* maupun opini yang dimintakan secara khusus oleh redaksi *Harian Kompas*.

Perbedaan antara penelitian Nathanael dengan peneliti juga terdapat pada subjek dan metode analisis penelitian yang dipakai. Nathanael menggunakan analisis wacana kritis model Teun Van Dijk untuk melihat wacana pluralisme yang ditampilkan melalui pemberitaan-pemberitaan di *Harian Kompas*. Sedangkan peneliti, menggunakan semiotika Charles S. Peirce sebagai metode penelitian dan film *Shape Of The Moon* sebagai subjek untuk melihat representasi pluralisme agama yang terdapat di dalamnya.

Tabel 2.1

Matrix Penelitian Terdahulu

Konteks	Velina Agatha Setiawan	Nathanael
Judul	<i>Representasi Pluralisme dalam Film “?” (Tanda Tanya)</i>	<i>Wacana Pluralisme dalam Pemberitaan Harian Kompas (Sebuah Studi Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pemberitaan Harian Kompas tentang Peristiwa Wafatnya Gus Dur pada edisi 31 Desember 2009-3 Januari 2010)</i>
Tujuan Penelitian	1. Untuk mengetahui representasi pluralisme yang ada di dalam film “?” (Tanda Tanya	2. Mengetahui bagaimana harian KOMPAS mewacanakan nilai-nilai pluralisme dalam pemberitaan tentang peristiwa wafatnya Gus Dur.
Metode	Metode semiotika televisi John Fiske	Analisis wacana kritis model Teun Van Dijk.
Hasil Penelitian	Film ini juga menggambarkan bahwa tiap agama mengajarkan untuk	Wacana pluralisme yang ditampilkan melalui pemberitaan-pemberitaan di <i>Harian Kompas</i> merupakan praktik

	selalu berbuat baik kepada setiap orang tanpa memandang perbedaan agama. Namun, di sisi lain ditemukan bentuk percampuran simbol-simbol agama. Kemunculan unsur pencampuran simbol-simbol agama yang terdapat dalam film “?” (Tanda Tanya) berdampak pada kekacauan paham keragaman sebagai pemersatu. Akibatnya, dapat meruntuhkan persepsi masyarakat tentang keragaman di Indonesia.	dari penerapan ideologi yang dimiliki oleh <i>Harian Kompas</i>, yakni humanisme transendental atau kemanusiaan yang beriman. Oleh karena itu, ketika Gus Dur wafat, <i>Harian Kompas</i> mengambil peran untuk mengingatkan kembali masyarakat Indonesia akan peran, perjuangan, dan sumbangsih yang telah Gus Dur lakukan dan berikan semasa hidupnya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi suatu reportase yang komprehensif baik <i>hard news</i>, <i>soft news</i> maupun opini yang dimintakan secara khusus oleh redaksi <i>Harian Kompas</i>.
Perbedaannya	Subjek penelitian peneliti adalah film dokumenter <i>Shape Of The Moon</i>. Selain itu, metode penelitian ini	Subjek dan metode penelitiannya berbeda. Subjek penelitian ini adalah film <i>Shape Of The Moon</i> dan metode penelitian yang digunakan adalah

	adalah semiotika Charles S. Peirce untuk melihat representasi pluralisme agama yang terdapat dalam film <i>Shape Of The Moon</i>	semiotika Charles S. Peirce
--	--	-----------------------------

2.2 Konsep-Konsep Yang Digunakan

2.2.1 Representasi

Pemahaman akan representasi diperlukan untuk mengidentifikasi dalam film. Menurut Hall (1997:17-19) representasi adalah produksi makna akan konsep-konsep di pikiran kita melalui bahasa. Hall menyatakan bahwa representasi melibatkan dua sistem atau proses. Pertama, sistem dimana semua jenis benda, manusia dan peristiwa-peristiwa terkorelasi dengan serangkaian konsep atau representasi mental didalam kepala kita. Sistem pertama ini disebut dengan representasi mental dan terbentuk dalam pikiran. Sedangkan yang kedua dinamakan representasi bahasa yakni proses dimana individu mengkonstruksi hal-hal terkait dengan kognisinya melalui bahasa yang berfungsi merepresentasikan konsep-konsep sesuatu hal.

Ada tiga pendekatan untuk menjelaskan bagaimana mengetahui makna representasi melalui bahasa. Ada pendekatan reflektif, pendekatan intensional dan

pendekatan konstruktivis (Hall, 1997: 24-25). Dalam pendekatan reflektif, makna dianggap berada dalam sebuah objek, seseorang, ide atau kejadian yang ada di dunia nyata dan bahasa bekerja layaknya sebuah cermin, untuk merefleksikan makna sesungguhnya yang sudah ada di dunia.

Perlu diingat, banyak kata, suara dan gambar yang ada. Hall menganalogikan dengan sebuah bunga mawar. Belum tentu “bunga mawar” di budaya lain adalah sebuah bunga yang memiliki duri . Sehingga untuk mengerti satu sama lain, salah satu dari kita harus mencari kode yang menghubungkan “bunga mawar” di budaya lain.

Dalam pendekatan intensional, makna harus sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pembuat tanda. Pemikiran kita harus dinegosiasikan dengan makna lain untuk kata-kata dan gambar yang sudah ada dalam bahasa sehingga kita langsung mengetahui makna yang dimaksud.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan konstruktivis. Dalam pendekatan ini, kita tidak perlu bingung dengan dunia material, di mana suatu benda atau orang memiliki praktik simbolik dan proses melalui representasi dan bahasa beroperasi. Dunia material bukan yang memberikan makna, melainkan sistem bahasa yang merepresentasikan konsep kita.

Lebih lanjut, Marcel Danesi dalam Wibowo (2009:121) menyatakan, representasi merupakan kegunaan dari tanda dan didefinisikan sebagai:

“Proses merekam ide , pengetahuan ,atau pesan dalam beberapa cara fisik disebut representasi . Ini dapat didefinisikan lebih tepat sebagai kegunaan dari tanda yaitu untuk menyambungkan , melukiskan, meniru sesuatu yang dirasa ,dimengerti, diimajinasikan atau dirasakan dalam beberapa bentuk fisik.....Dapat dikarakterisasikan sebagai proses konstruksi bentuk X untuk menimbulkan perhatian kepada sesuatu yang ada secara material atau konseptual ,yaitu Y, atau dalam bentuk spesifik Y, $X = Y$. “

Danesi mencontohkan representasi dengan sebuah konstruksi X yang dapat mewakili atau memberikan suatu bentuk kepada suatu materiil atau konsep tentang Y. Contoh yang dapat diambil adalah pada film Soekarno, kepemimpinan Soekarno yang kharismatik ditandai oleh gaya pidatonya yang berapi-api sehingga memiliki jumlah pengikut yang banyak.

Menurut Eriyanto (2001:13) representasi penting dalam dua hal. Pertama, apakah kelompok, seseorang atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya. Kata semestinya ini mengacu pada apakah seseorang atau kelompok itu ditampilkan. Dengan kata, kalimat, aksentuasi dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan melalui media kepada khalayak.

2.2.2 Semiotika

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani *Semeion* yang berarti tanda. Tanda tersebut didefinisikan sebagai suatu yang dapat dianggap mewakili suatu yang lain, atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya. Tanda pada awalnya dimaknai sebagai suatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain (Wibowo, 2011: 5).

Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Semua yang hadir dalam kehidupan dapat dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus diberi makna. Merujuk pada Ferdinand de Saussure (1916), tanda dilihat sebagai pertemuan antara bentuk dan makna. Saussure menggunakan istilah *signifiant* untuk segi bentuk suatu tandan dan *signifie* untuk segi maknanya. Dengan demikian, de Saussure melihat tanda sebagai sesuatu yang menstruktur dan terstruktur dalam kognisi manusia. *Signifiant* bukan bunyi bahasa secara konkret, tetapi merupakan citra tentang bunyi bahasa.

Apa yang ada dalam kehidupan dilihat sebagai bentuk yang mempunyai makna tertentu. Hubungan antar bentuk dan makna tidak bersifat pribadi, tetapi sosial (Hoed, 2011: 3).

Ferdinand de Saussure menjadi sumber dari jenis semiotika strukturalis. Strukturalis menekan uraian tentang ilmu yang mengkaji bahasa sebagai sistem tanda-tanda. Selain itu, Ferdinand de Saussure mengemukakan adanya kemungkinan suatu ilmu yang mengkaji tanda-tanda dalam masyarakat.

Di sisi lain, semiotik pragmatis bersumber pada Charles Sanders Peirce (1931-1958). Bagi Peirce, tanda merupakan sesuatu yang mewakili sesuatu. Danisi dan Perron dalam Hoed (2011: 19) menulis bahwa teori semiotik seperti itu sudah ada sejak Hippocrates (460-337 SM) yang mendefinisikan tanda dari bidang kedokteran sebagai gejala fisik yang mewakili suatu penyakit.

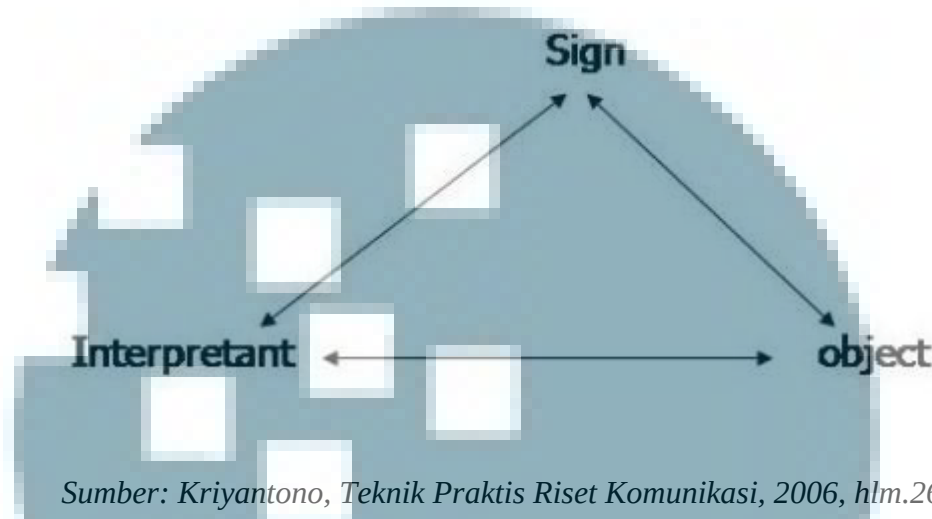
Benny Hoed (2011: 4) menyatakan semiotik pragmatis Peirce, dalam mengungkap sesuatu di balik tanda diawali dengan sebuah proses kognisi yang berasal dari apa yang ditangkap oleh pancaindera manusia.

Peirce menyebut tanda yang pertama dan yang mewakili sesuatu dalam beberapa hal atau kapasitas sebagai representamen (*ground*). Sedangkan objek merupakan sesuatu yang diwakili dan berada di dalam kognisi. Antara representamen dan objek memiliki proses hubungan yang disebut sebagai semiosis. Danesi (2002: 36) menyebutkan lebih lanjut bahwa dalam pemaknaan tanda, semiosis tersebut belum lengkap apabila tidak dilengkapi dengan proses penafsiran yang disebut juga sebagai interpretasi.

Hubungan tiga dimensi yang dinyatakan oleh Peirce membentuk sebuah pola siklus yang dinamis. Hal inilah yang membedakan teori semiotika strukturalis Saussure yang bersifat diakronik dan teori semiotika pragmatis Peirce yang dapat disebut juga teori semiotika trikonomis, atau teori pemaknaan tiga tahap.

Adapun penggambaran *triangle of meaning* Peirce yang diambil dari buku *Teknik Praktis Riset Komunikasi* karya Rachmat Kriyantono tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Segitiga Makna Charles S. Peirce



Ketiga elemen dalam semiotika Peirce saling berhubungan. Berikut penjabaran dari ketiga elemen utama dalam segitiga makna milik Peirce.

1. Tanda: sesuatu yang berbentuk fisik dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk hal lain di luar tanda itu sendiri acuan tanda itu disebut objek.
2. Objek: konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda.
3. Interpretan: konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tergantung objek yang dirujuk sebuah tanda.

Peirce kemudian membedakan tanda menjadi beberapa tipe. Tipe tanda tersebut antara lain Ikon (*icon*), Indeks (*indeks*), dan Simbol (*Symbol*) yang didasarkan atas relasi dia antara representamen dan objeknya.

1. Ikon: tanda yang mengandung kemiripan rupa sehingga tanda mudah dikenal oleh pemakainya. Di dalam ikon, hubungan antara representamen dan objeknya terwujud sebagai kesamaan dalam beberapa kualitas.
2. Indeks: tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensial di antara representamen dan objeknya. Di dalam indeks, hubungan antara tanda dengan objeknya bersifat konkret, aktual dan biasanya melalui suatu cara yang sekuensial atau kasual.
3. Simbol: jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional sesuai konvensi sejumlah orang atau masyarakat. Tanda-tanda kebahasaan pada umumnya adalah simbol-simbol.

Teori Peirce sering disebut sebagai *grand theory* karena gagasan Peirce bersifat menyeluruh. Peirce mencoba mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan semua komponen dalam suatu struktur (Wibowo, 2011: 14). Upaya klasifikasi yang dilakukan oleh Peirce terhadap tanda memiliki kekhasan meski tidak bisa dibilang sederhana.

Pengamat film Van Zoestmen menilai bahwa menggunakan semiotika Peirce lebih memberikan perspektif pada penelitian tentang film karena penanganan terhadap konsep-konsep Peirce seperti 'ikon', 'indeks', dan 'simbol' lebih memberikan perspektif (Sobur, 2006: 130).

Berdasarkan teori tanda dan makna yang telah dijabarkan diatas, lebih lanjut penelitian ini akan menggunakan teori semiotika pragmatis Charles Sanders Peirce dalam mengeksekusi makna-makna dari tanda yang timbul dalam sebuah film.

2.2.3 Film sebagai media komunikasi

Menurut John Fiske (2012:29-30) medium adalah alat-alat yang sifatnya teknis atau fisik yang mampu mengubah pesan menjadi sinyal sehingga memungkinkan untuk ditransmisikan pada saluran. Medium dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu :

1. Presentasi media: Suara, wajah, tubuh. Hal-hal tersebut menggunakan bahasa alami seperti kata-kata yang terucap, ekspresi, bahasa tubuh dan sebagainya. Elemen presentasi media membutuhkan kehadiran komunikator yang menjadi medium, terbatas pada saat ini dan sekarang dan juga memproduksi berbagai tindak komunikasi.
2. Media representasi: Buku, lukisan, foto, tulisan, arsitektur, dekorasi, interior, kebun dan sebagainya. Banyak sekali media yang menggunakan konvensi-konvensi budaya dan estetika untuk menciptakan “teks” sejenis media representasi. Teks-teks tersebut bersifat representasi dan kreatif. Media ini membuat sebuah teks yang dapat merekam media dari kategori presentasi media dan dapat eksis secara mandiri tanpa komunikator. Kategori media ini memproduksi karya-karya komunikasi.
3. Media mekanis: Telepon, radio, televisi, teleks. Media ini adalah transmitter-transmitter dari dua kategori di atas. Perbedaan utamanya adalah media mekanis menggunakan saluran-saluran yang dibuat oleh ahli mesin.

Film dianggap sebagai salah satu media representasi yang paling efektif dalam menyampaikan pesan terhadap khalayak. Hal ini disebabkan, karena sifat film yang audiovisual dan mudah dicerna. Karena sifatnya yang mudah dicerna itu, film kerap kali digunakan untuk merepresentasikan sebuah realitas maupun cerita. Film memiliki sifat “*see what you imagine*”. Dalam hal ini, ditekankan, bahwa khalayak tidak perlu mengimajinasikan seperti apa pesan yang disampaikan oleh *source* atau sumbernya, karena sifat film yang audiovisual.

Menurut Sobur (2009: 127) hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Hal ini berarti, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat sesuai dengan muatan pesan di dalamnya tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan kemudian memproyeksikan hal tersebut di atas layar.

Film merupakan bidang kajian yang relevan bagi analisis semiotika, mengutip Van Zoest dalam Sobur (2009: 128) yang menyatakan, film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda ini termasuk dalam berbagai sistem tanda yang bekerja sama untuk mencapai efek yang diharapkan. Hal yang paling penting dalam sebuah film adalah gambar dan suara, kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film. Sistem semiotika yang lebih penting dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu.

Film menuturkan ceritanya dengan cara khususnya sendiri. Kekhususan film adalah mediumnya, cara pembuatannya dengan kamera dan pertunjukannya dengan proyektor dan layar. Lebih lanjut, van Zoest menjelaskan, pada sintaksis dan semantik film dapat dipergunakan pengertian-pengertian yang dipinjam dari ilmu bahasa dan sastra, tetapi akan merupakan metafor-metafor, jadi dengan pengertian-pengertian yang dipergunakan sebagai perbandingan—tidak perlu kita tolak. Film juga sebenarnya tidak jauh beda dengan televisi.

Namun, film dan televisi memiliki bahasanya sendiri dengan sintaksis dan tata bahasa yang berbeda. Tata bahasa itu sendiri terdiri atas semacam unsur yang akrab, seperti pemotongan (*cut*), pemotretan jarak dekat (*close-up*), pemotretan dua (*two shot*), pemotretan jarak jauh (*long shot*), pembesaran gambar (*zoom-in*), pengecilan gambar (*zoom-out*), memudar (*fade*), pelarutan (*dissolve*), gerakan lambat (*slow motion*), gerakan yang dipercepat (*speeded-up*) atau efek khusus (*special effect*). Begitulah, sebuah film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol visual dan linguistik untuk meng-kode-kan pesan yang sedang disampaikan (Sobur, 2009: 130-131).

Berbeda dari permasalahan “tanda” bahasa di mana hubungan bersifat arbitrer (semena) antara tanda dan benda (*choses*), penanda sinematografis memiliki hubungan “motivasi” atau “beralasan” (*motivation*) dengan penanda yang tampak jelas melalui hubungan penanda dengan alarm yang dirujuk. Petanda sinematografis selalu kurang lebih, kata Christian Metz, “beralasan” dan tidak pernah semena.

Hubungan motivasi itu berada baik pada tingkat denotatif maupun konotatif. Hubungan denotatif yang beralasan itu lazim disebut analogi, karena memiliki persamaan perseptif/auditif antara penanda/petanda dan referen (Sobur, 2009:131-132).

2.2.4 Film Dokumenter

Film memiliki beragam genre, diantaranya drama ilmiah, fiksi ilmiah, animasi, komedi, drama karakter, drama sejarah, dokumenter, film detektif, film suspense, film monster, horor, musik, perang, aksi petualangan noir, western, roman, melodrama (Danesi, 2010: 159). Film dokumenter merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan setiap individu digambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam situasi yang apa adanya. Sedangkan film animasi atau kartun adalah film yang diciptakan melalui teknik ilusi gerakan dan serangkaian gambar benda dua atau tiga dimensi (Danesi, 2010: 134-135).

Sebagai salah satu genre dalam film, menurut McLane (2012: 1-4) film dokumenter secara tradisional, memiliki kesamaan satu sama lain. Namun, memiliki perbedaan dari film jenis lainnya terutama film fiksi. Pemahaman tentang film dokumenter terbagi menjadi beberapa aspek.

1. Subjek (*subjects*), selama beberapa dekade terakhir, film dokumenter umumnya memfokuskan pada kondisi yang melibatkan perasaan individual manusia, hal ini memiliki hubungan dengan genre seperti fiksi

naratif atau drama. Contohnya, film dokumenter berseri berjudul, *Expedition Borneo (2012)* yang dirilis oleh BBC, film ini secara jelas menceritakan kondisi alam di jantung hutan Kalimantan.

2. Tujuan atau sudut pandang (*purpose/viewpoint/approach*), hal ini adalah yang pembuat film berusaha untuk katakan dalam film yang telah mereka buat. Mereka merekam terkait peristiwa sosial, budaya, alam, lembaga pemerintahan dan politik, peristiwa penting, institusi dan lain-lain. Para pembuat film dokumenter berniat untuk meningkatkan pemahaman khayalak, rasa simpati terkait subjek yang dituju, bahkan tindakan kedepan penonton.
3. Bentuk (*form*), atau hal yang berkembang dari proses formatif. Konsep asli, mulai dari latar belakang dan suara dicantumkan kedalam visi pembuat film berdasarkan struktur yang ada. Pembuat film dokumenter membatasi diri dalam segi pengambilan gambar dari apa yang sudah ada daripada membuat konten sendiri. Mereka tidak menciptakan keadaan yang terjadi sesuai dengan imajinasi pembuat film, dan tidak mengembangkan karakter (*character development*) seperti yang dilakukan para pembuat film fiksi. Bentuk dalam dokumenter ditentukan oleh subjek, tujuan dan pendekatan yang direkam.

4. Teknik dan metode produksi (*production method and technique*) yang mengacu pada cara pengambilan gambar dan suara, keduanya di edit secara bersamaan. Syarat dari dasar dari sebuah film dokumenter adalah penggunaan orang-orang nyata yang "berperan sebagai diri sendiri" (*nonactors*). Syarat yang lainnya adalah pengambilan gambar yang dilakukan di lokasi kejadian ketimbang dari dalam studio. Dalam set pengambilan gambar dokumenter, sangat jarang dilakukan konstruksi. Selain penerangan untuk wawancara, *lighting* biasanya memakai apa yang ada di lokasi, dan hanya dilakukan ketika dibutuhkan untuk mencapai informasi yang memadai.

5. Respons khalayak (*audience response*) keinginan para pembuat film dokumenter pada umumnya adalah pengalaman sebuah keindahan seni dan sikap yang memungkinkan mengarah pada sebuah tindakan. Film dokumenter lebih menonjolkan keterampilan profesional dalam prosesnya ketimbang gaya pribadi pembuat film. Oleh karena itu, respon khalayak tidak terlalu tertuju kepada sang artis melainkan lebih kepada pelajaran yang dapat diambil dari film dokumenter tersebut.

Film dokumenter merupakan film non-fiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan setiap individu digambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam situasi yang apa adanya. Sedangkan film animasi atau kartun

adalah film yang diciptakan melalui teknik ilusi gerakan dan serangkaian gambar benda dua atau tiga dimensi (Danesi, 2010:134-135).

2.2.5 Pluralisme

Pluralisme merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi keberagaman sosial atau stratifikasi sosial yang muncul dalam masyarakat. Mengutip Chopp dalam Dzuhayatin (2001: 253) yang mengatakan, keberagaman tersebut meliputi perbedaan pandangan, etnis, agama, peran, dan orang dalam sebuah masyarakat. Pada awal masa perkembangannya, konsep akan keberagaman/pluralitas ini harus melalui sebuah perjalanan panjang hingga akhirnya dipahami sebagai fakta dasar dari keberadaan umat manusia, yang harus disadari dan diakomodasi oleh setiap tatanan sosial yang ada.

Sementara, jika dilihat dari akar kata, pluralisme (berasal dari bahasa Inggris "*pluralism*") berarti "jamak" atau "lebih dari satu". Dalam kamus bahasa Inggris, arti kata dari pluralisme memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama berhubungan dengan lembaga kegerejaan, yang juga merupakan sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan maupun non-kegerejaan. Kedua, secara filosofis, adalah sistem pemikiran yang menyetujui pemikiran yang memiliki landasan pemikiran lebih dari satu. Pengertian ketiga, memiliki kaitan dengan aspek sosial-politik, yakni suatu sistem yang mengakui koeksistensi keberagaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran ataupun partai dengan

tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan diantara kelompok lain (Thoha, 2005: 12).

Menurut Abdillah (2001) salah satu syarat untuk menciptakan masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Masyarakat Indonesia sebagai negara majemuk pasti memiliki perbedaan budaya dan aspirasi, namun Abdillah menambahkan bahwa masyarakat yang majemuk harus memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan lainnya. Masyarakat juga harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam *The Oxford English Dictionariy* disebutkan bahwa pluralisme diartikan menjadi dua pemahaman.

1. Sebagai suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis dan sebaliknya mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi terutama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik.
2. Toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat maupun negara, serta keragaman kepercayaan dan sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan sebagainya.

Dari kedua definisi di atas, dapat diartikan juga bahwa definisi pertama mengandung pengertian pluralisme dalam ranah politik, sedangkan definisi kedua mengandung pengertian pluralisme dalam masyarakat sosial atau primordial (Abdillah, 2001).

Lebih dalam, Biku Parekh (2000: 3) menyatakan, secara umum terdapat tiga bentuk utama keberagaman di dalam masyarakat modern.

1. Bentuk keberagaman yang sub-kultural (*subcultural diversity*), yakni kelompok masyarakat yang hidup dalam tatanan budaya yang sama, meski demikian dalam hal tertentu memiliki bentuk kepercayaan yang berbeda-beda. Kelompok ini, seperti kaum *lesbian, gay*, buruh, nelayan, petani, eksekutif, selebritis, kadangkala mengembangkan jalan hidupnya sendiri yang berbeda dengan satu sama lain.
2. Bentuk keberagaman perpektival (*perspectival diversity*), yakni kelompok masyarakat yang kritis terhadap beberapa prinsip sentar yang ada dari kebudayaan dalam sekelompok masyarakat dan berusaha menentang bahkan mengubahnya. Contohnya, kelompok kaum feminis yang menentang sitem patriarkhis, kaum religius yang menentang orientasi hidup yang sekular, dan sebagainya.
3. Bentuk keberagaman komunal (*communal diversity*), yakni kelompok yang terorganisasi dengan baik dan hidup dengan sistem kepercayaan mereka sendiri. Contohnya adalah imigran, komunitas keagamaan, dan

kelompok kultural seperti masyarakat-masyarakat adat (seperti suku Dayak, Toraja, atau suku Badui Dalam).

Terkait dengan keberagaman di atas, dalam dunia modern ini pluralisme harus tetap hidup berdampingan dengan yang disebut *practical philosophical relativism* yang didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat tidak akan pernah mencapai kesepakatan yang absolut dalam kesatuan pokok atau keseragaman realitas.

Sedangkan definisi pluralisme menurut Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2005 adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan karenanya kebenaran setiap agama relatif. Maka dari itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Lebih lanjut, Musyawarah Nasional VII MUI juga menambahkan pluralisme agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

Pemahaman ini adalah keliru karena hanya menganggap pluralisme sebagai konsep relasi transendental manusia saja dan bukan sebagai suatu sistem sosial atau pluralisme sosiologis. Pluralisme bukanlah sebuah paham yang meyakini bahwa semua agama adalah sama atau relativisme. Paham pluralisme sebenarnya adalah paham yang secara tegas mendorong agar keragaman menjadi suatu potensi untuk membangun toleransi, kerukunan dan kebersamaan lewat keterlibatan aktif (Ali, 2012:72).

Karena munculnya perbedaan pemahaman ini, pluralisme pun berkembang menjadi diskusi yang semakin luas dan kompleks. Pluralisme juga kerap dijadikan penyelesaian dari berbagai konflik atau ketegangan antar agama, yang dibumbui dengan kekejaman, kekerasan, perang, pembunuhan bahkan pembersihan ras (*ethnic cleansing* atau *genocide*) (Thoha, 2005:1).

Sikap pluralis kini makin diperhatikan dan diterima banyak pemikir dan tokoh keagamaan, meskipun dalam pengertian yang berbeda. Benih dan unsur-unsur pluralis juga dapat ditemukan secara acak dalam berbagai pemikiran dan sikap yang mengedepankan toleransi dan keterbukaan (Ali, 2003).

Mengutip Habernas, dalam Dzuhayatin (2001: 254) yang menyatakan bahwa sikap pluralis, adalah hal yang tidak dapat terelakkan, dan hal ini akan memberikan peluang bagi bidang keagamaan, politik, bahkan perorangan untuk tumbuh dan berkembang. Sikap pluralis juga dapat membuka peluang menumbuhkan demokrasi, refleksi, dan transformasi positif di dalam masyarakat.

2.2.6 Pluralisme di Indonesia

Indonesia jika dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan sebagainya merupakan salah satu negara paling majemuk di dunia. Bukti nyatanya adalah rumusan konsep pluralisme dengan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” dan kemunculan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme (Abdillah: 2001).

Baghi (2012:10) menyatakan secara kultural, prinsip *kebhinekaan* tidak hanya dimengerti sebagai multiplisitas jumlah, namun tetap harus dipahami juga menurut kandungan makna diversitas yang lain. Baghi menambahkan, bahwa penekanan pada *diversitas* akan mengantar pada selangkah lebih maju daripada sekedar mencapai pemahaman pluralisme, yakni dengan mencapai pengakuan dan menumbuhkan respek terhadap perbedaan-perbedaan yang tak terhitung (*incommensurable*).

Namun, pemahaman tentang pluralisme di Indonesia kadangkala dipersempit maknanya menjadi sebatas pluralisme teologis atau toleransi beragama. Hal ini sesuai dengan pemahaman pluralisme menurut Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2005 yang diuraikan pada bagian sebelumnya.

Mengutip Nurcholish Madjid dalam Ali (2012:22-23) pluralisme tidak bisa dipahami sekadar sebagai “kebaikan negative” (*negative good*), yang hanya dilihat dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme, tetapi harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.

Oleh karena itu, pemahaman akan pluralisme masih berbeda-beda di setiap orang. Untuk menghindari kesalahpahaman, mengutip John Rawls dalam Baghi (2012:23) yang menjelaskan batasan dari pluralisme adalah bagaimana membentuk kesadaran diri untuk bergerak menuju kesadaran bersama dengan bertolak dari

kesadaran akan berbagai perbedaan. Tidak tepat berbicara tentang pluralisme dengan mengacu pada kerangka berpikir yang dimulai dari diri atau dunianya.

Lebih lanjut, Baghi menambahkan bahwa pluralisme sebaiknya dipahami sebagai upaya “penerimaan dan penghargaan keragaman dan upaya bekerja bersama-sama orang atau kelompok lain demi mencapai kebaikan bersama”.

Di Indonesia, diskusi tentang pluralisme ditempatkan dalam kerangka diskursus tentang multikulturalisme. Diskursus ini memiliki satu tujuan yaitu mencari solusi terhadap segala persoalan dalam kemajemukan masyarakat (*plurality of society*) yang antara lain ditandai dengan memberikan prioritas dan pelayanan lebih terhadap kelompok mayoritas yang mendominasi aneka sumber daya (Baghi, 2012:28).

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan rekomendasi untuk mengubah paradigma pendekatan dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural (Baghi, 2012:28). Lebih lanjut dalam konteks ini, Baghi mengutip perkataan Suparlan, antropolog Indonesia yang berisi:

Berbagai tindakan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong minoritas, atau pemaksaan untuk mengubah cara hidup dan kebudayaan mereka yang tergolong minoritas (atau asimilasi) adalah pola-pola kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat majemuk. Berbagai kritik atau pertentangan terhadap dua pola yang umum dilakukan oleh golongan dominan terhadap minoritas biasanya tidak mempan, karena golongan dominan mempunyai kekuatan yang berlebihan dan dapat memaksakan kehendak mereka baik secara kasar dengan kekuatan militer atau polisi atau dengan menggunakan ketentuan hukum dan berbagai cara lain yang secara sosial dan budaya masuk akal bagi kepentingan mereka yang dominan. Cara yang terbaik adalah dengan mengubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural (*multicultural society*), dengan mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman

hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia (Baghi, 2012: 28-29).

Mengikuti pandangan Suparlan ini, maka Indonesia yang multikultural sebaiknya menjadi sebuah ideologi bersama yang mendasari segala bentuk dan upaya kebijakan politik dan demokrasi, guna mengakomodasi semua identitas dan perbedaan.

2.2.7 Pluralisme Agama

Pluralisme agama pada telah banyak diangkat oleh banyak ajaran agama. Pluralisme agama merupakan paham yang menerima keberagaman dalam agama. Menurut Ali (2003:6) Pluralisme agama mengajak keterlibat aktif dengan orang yang berbeda agama (*the religious other*) dengan tidak sekedar toleransi saja namun juga memahami.

Lebih lanjut, Ali menambahkan pluralisme agama dapat berfungsi sebagai sebuah paradigma yang efektif bagi pluralisme sosial demokratis di mana kelompok-kelompok manusia dengan latar belakang yang berbeda bersedia membangun sebuah komunitas global.

Pluralisme dalam agama mengakui keragaman kelompok-kelompok keagamaan, hak-hak keimanan, penampilan aktivitas, eksistensi jemaah dan kegiatan-kegiatan yang sah untuk setiap orang maupun kelompok (Ali, 2012: 71).

Pluralisme merupakan dasar untuk terciptanya kerukunan yang dinamis dan dialogis dalam masyarakat yang majemuk, baik menyangkut perbedaan bawaan seperti pengetahuan, etnis, dan sebagainya.

Ali (2012:72) mengutip Ali Shiwab menyatakan, pada garis besarnya konsep pluralisme agama dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan tetapi mengandung makna “keterlibatan aktif” terkait kenyataan dari kemajemukan itu sendiri.
2. Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme merujuk kepada suatu realitas di mana aneka agama, ras, bangsa hidup pada suatu lokasi, kendati tanpa interaksi positif.
3. Konsep pluralisme tidak sama dengan relativisme, yang berasumsi bahwa kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakat. Aliran seperti ini dinilai tidak mengenal kebenaran universal.
4. Pluralisme agama bukan sinkretisme, yakni agama baru yang diracik dari ajaran agama-agama yang telah mapan secara parsial.

Lebih lanjut dalam pluralisme agama, Ali (2008:13) menegaskan pluralisme agama memiliki kaitan dengan basis teologis bagi perdamaian antar-umat beragama yang terbagi menjadi empat prinsip :

1. Prinsip kebebasan agama, prinsip ini menyatakan tidak boleh ada paksaan dalam agama. Segala bentuk pemaksaan dalam agama justru melahirkan iman yang tidak sejati dan tidak dapat dikatakan sah.
2. Prinsip toleransi (*tasamuh*), yaitu setiap individu beriman tidak bisa dan tidak kecuali membiarkan penganut agama lain menyatakan dan menerapkan keimanannya (toleransi pasif), atau membantunya dalam melaksanakan keimanannya itu.
3. Prinsip aksiologis, yang berarti bahwa tujuan hidup bagi tiap penganut keyakinan adalah membawa kebaikan, mencegah dampak buruk, dan meyakini Zat Maha Tinggi, yang bisa dijadikan rujukan permanen (*benchmark*).
4. Prinsip kompetisi dalam kebaikan, tiap umat beragama berhak sekaligus wajib untuk bersaing secara sehat dan jujur untuk mengembangkan keyakinannya.

Menurut Cecelia Lynch dalam Ali (2003:72-75) basis teologis pluralisme agama, memiliki lima kategori sikap beragama seseorang atau kelompok yang memiliki timbal balik terhadap sikap kultural yang mendasari basis teologi. Pertama, sikap eksklusif, yang mengagungkan superioritas sistem kepercayaannya sendiri dan menonjolkan hak untuk menyebarkan sistem itu seluas mungkin, sikap ini pada umumnya memiliki ketakutan terbesar bahwa hak hidup beragamanya terganggu. Kedua, sikap apologetik baik dalam arti sikap mempertahankan doktrin ketika

mendapatkan tantangan dari luar atau sebagai bentuk usaha untuk menunjukkan bahwa doktrin sendiri konsisten dan superior dibandingkan dengan doktrin lain.

Ketiga, sikap sinkretis yang mengakui beragamnya tradisi keagamaan yang tidak hanya di dalam masyarakat dengan beragam budaya, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Keempat, sikap inklusif yang menerima validitas atau hak sistem kepercayaan lainnya untuk eksis, meskipun sistem kepercayaan lain itu dianggap kurang sempurna atau kurang benar. Sikap kelima, sikap pluralis yang mengakui bahwa kebenaran itu beragam dan mempunyai sikap positif akan kesamaan tujuan dan fungsi dari semua agama.

Hal ini memiliki kaitan dengan Kristenisasi dan Islamisasi dianggap sebagai ancaman yang harus dihindari. Padahal, kegiatan misi agama adalah hak dan kewajiban bagi setiap penganut agama, yang apabila dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku maka tidak akan menimbulkan gesekan-gesekan, dan justru sejalan dengan proses demokrasi (Ali, 2003:28).

2.2.8 Toleransi

Indonesia sebagai negara majemuk, mengakui *hak untuk berbeda* dan menuntut *kewajiban untuk berintergrasi* merupakan prakondisi untuk pluralisme dan demokrasi, maka masyarakat menjadi perlu mementingkan nilai toleransi (Baghi, 2012: 39).

Mengutip deklarasi prinsip-prinsip yang dikeluarkan UNESCO pada tahun 1995 dalam Baghi (2012:40) yang salah satunya berbunyi “Toleransi adalah

penghargaan, penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman cara-cara manusia, bentuk-bentuk ekspresi dan kebudayaan”. Pembatasan toleransi ini dikonstruksi ke dalam kerangka pemahaman tentang pluralisme. Pada saat ini, berbagai diskusi tentang toleransi muncul dalam ranah etika dan politik dengan kesadaran dan niat untuk hidup bersama di tengah perbedaan.

Dalam lingkup kultural, toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling mengerti dan menerima segala diversitas kultural dalam hubungan antara satu sama lain. Masalah terkait isu intoleran atau tidak toleransi kerap kali muncul di Indonesia, sikap tidak toleransi umumnya muncul akibat adanya ketidaksukaan antara kaum mayoritas dengan minoritas maupun sebaliknya (Baghi, 2012: 362). Anna Elisabetta Galeotti dalam Baghi (2012:366-367) menyimpulkan penyebab persoalan menyangkut toleransi berkembang

- a. Persoalan terkait toleransi muncul di seputar pertikaian antara kalangan mayoritas dan minoritas yang hidup berdampingan di dalam sebuah masyarakat tertentu.
- b. Menyangkut berbagai ciri pembawaan tingkah laku, keyakinan serta praktik kelompok-kelompok minoritas yang dicap berbeda dan tidak disukai oleh kalangan mayoritas.
- c. Ketika kelompok minoritas dipandang sedang menebar suatu ancaman terhadap tatanan tradisional dan kehidupan yang lazim berlaku selama ini di dalam masyarakat bersangkutan

- d. Ketika kelompok minoritas bersedia untuk melawan sikap tidak toleran, dan melantangkan klaim-klaim toleransi public menyangkut perbedaan-perbedaan yang dimilikinya.

Toleransi secara tradisional bersangkutan dengan beragam perilaku, cara hidup serta moralitas yang walaupun pada umumnya tidak akan pernah sama, namun tetap dipandang sebagai hal yang dapat diterima di tengah masyarakat tanpa menimbulkan ancaman bagi tatanan sosial dan politik (Baghi, 2012: 389).

2.2.9 Agama

Menurut Caputo (2001) dalam Ibrahim dan Akhmad (2014: 134) agama terlalu memiliki banyak makna dan terlalu jamak untuk dimasukkan hanya kedalam satu subjek. Sebab ada banyak sekali agama-agama Barat, agama-agama Timur, agama-agama Purba, agama-agama modern, agama monoteistik, agama politeistik, dan bahkan ada sedikit agama yang ateistik.

Menurut Ibrahim dan Akhmad (2014: 134-136), ada dua definisi agama yang telah memunculkan perdebatan di kalangan sosiolog agama yakni, pandangan *substansif* dan *fungsionalis* mengenai agama. Berikut penjelasan mengenai kedua pendekatan tersebut.

1. Pendekatan *substansif* adalah pendekatan yang memahami agama sebagai yang dicirikan oleh unsur-unsur inti tertentu, seperti keyakinan terhadap dewa atau dewa-dewa kekuatan adikodrati lain, orang yang memiliki

peran religius khusus seperti *kiyai*, pendeta atau dukun, kita suci atau tradisi, ritual, dan tempat suci. Pada praktiknya, definisi ini cenderung terjebak ke dalam bias asumsi-asumsi kultural dan ketidakmampuan untuk menangkap kompleksitas budaya dan masyarakat dunia yang beraneka ragam.

2. Pendekatan *funksionalis* dalam mendefinisikan agama tidak menganggap bahwa agama dicirikan oleh unsur-unsur tertentu, melainkan oleh kemampuan untuk menampilkan fungsi-fungsi tertentu bagi masyarakat secara lebih luas. Dalam pendekatan fungsionalis, setidaknya terdapat tiga fungsi berbeda yang secara potensial bisa diperankan oleh agama.

1) Fungsi sosial, dalam pandangan ini, agama bagi manusia adalah suatu pengalaman komunitas (*an experience of community*) dan mengikat mereka ke dalam suatu tatanan sosial berdasarkan keyakinan bersama, dan nilai-nilai yang menyediakan suatu struktur bagi kehidupan mereka sehari-hari.

2) Fungsi eksistensial/hermeneutik, pandangan ini menilai agama menyediakan orang-orang dengan serangkaian sumber daya (seperti, mitos, ritual, simbol, keyakinan, nilai, cerita) yang dapat membantu mereka menjalani hidup dengan perasaan akan identitas (*a sense of identity*).

3) Fungsi transenden, beranggapan bahwa agama adalah sebuah medium yang dengan medium itu orang-orang mampu mengalami atau

merasakan kehadiran “Tuhan”, sebuah pengalaman transenden yang tak terhingga yang bisa dialami manusia.

Jika melihat hal diatas, hal yang terpenting dari sebuah agama adalah agama dan keberagaman merupakan fitrah manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan fitrah untuk memiliki agama dan keberagamannya yang kemudian akan dipraktikkan manusia dalam kehidupannya. Dengan fitrah keberagamannya itulah, agama menjadi inspirasi bagi tindakan masyarakat dalam dunia sosial (Ibrahim dan Akhmad 2014: 139).

UMN

2.3 Kerangka Pemikiran

